

POLITIK IDENTITAS DALAM PANGGUNG PILWANA
(Studi Kasus Pemilihan Wali Nagari Sungai Jambu Kecamatan Pariangan
Kabupaten Tanah Datar)

IDENTITY POLITICS IN THE PILWANA STAGE
(Case Study Of The Election Of The Guardian Of Nagari Sungai Jambu,
Pariangan District, Tanah Datar Regency)

¹Metri hertika

Email: hertikametri@gmail.com
NIM 1830307012

²Novi Budiman, M.Si

Email: Novibudiman@iainbatusangkar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwa politik identitas dapat mewarnai pemilihan wali nagari (pilwana) di kenagarian sungai jambu tahun 2021. Serta penelitian ini berusaha membahas permasalahan pokok dari bentuk politik identitas yang dimainkan oleh calon kandidat atau elit-elit politik sebagai sarana meraih kekuasaan dalam menduduki sebuah jabatan. Maka dari itu penelitian ini menunjukkan identitas simbol kesukuan, daerah (jorong) melalui pemanfaatan jejaring para tokoh masyarakat serta para pendukung yang berasal dari putra daerah sendiri di pilwana tersebut.

Kata kunci: Pilwana, Politik Identitas, Elit Politik

Abstract

This study aims to explain that identity politics can color the election of wali nagari (pilwana) in the guava river in 2021. And this study tries to discuss the main problems of the form of identity politics played by candidate candidates or political elites as a means of gaining power in occupying a position. Therefore, this study shows the identity of ethnic symbols, regions (jorong) through the use of networks of community leaders and supporters who come from the region's own sons in the pilwana.

Keywords: Pilwana, Identity Politics, Political Elite

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam administrasi pemerintahan yang dibagi menjadi atas wilayah provinsi dan daerah, provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Selanjutnya daerah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas nagari, desa atau kelurahan. Dengan bergulirnya zaman reformasi yang menuntut diberlakukannya otonomi daerah, maka dari itu dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yaitu sebuah kewenangan daerah otonom yang bisa

mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat tersebut.

Desa atau nagari yang ada di Sumatera Barat merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang sangat jelas secara teritorial, yang mana desa atau nagari yang kebanyakan berada di daerah Jawa sedangkan nagari dengan bentuk kekhasan Minang. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa, desa maupun nagari memiliki hak untuk mengatur dan mengurus wilayah nagari berdasarkan kepentingan masyarakat nagari, yang sering kita sebut dengan otonomi desa atau nagari. Otonomi desa atau nagari merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan pemberian pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh nagari tersebut (Wijaya, 2003: 165).

Bentuk otonomi yang dimiliki oleh nagari atau desa tersebut adalah adanya hak dan wewenang dalam memilih pemimpinnya. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum tertentu yang memiliki kekuasaan pemimpin yang bertindak atas kesatuan masyarakat. Terkait dalam kewenangan mengurus wilayahnya tersebut, maka dari itu nagari memiliki kewenangan dalam memilih pemimpinnya. Layaknya sebuah nagari yang dipimpin oleh seorang wali nagari, maka desa dipimpin oleh seorang kepala desa.

Dalam pemilihan wali nagari (Pilwana) ada suatu proses dimana masyarakat nagari dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon wali nagari yang sesuai dengan pilihannya. Pemilihan wali nagari juga merupakan sebuah seleksi terhadap lahirnya pemimpin yang terpilih dengan tujuan untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat nagari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemilihan wali nagari tersebut sangat penting, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan nagari, yang mana dalam pemilihan wali nagari secara serentak di Tanah Datar telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2021 sebanyak 21 nagari yang tersebar di 11 kecamatan dan sudah termasuk di kenagarian Sungai Jambu, kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar yang diwakili oleh empat calon kandidat yang berasal dari masing-masing jorong.

Namun setiap kontestasi pemilu ataupun pilwana selalu menghadirkan

isu-isu yang menarik untuk diperbincangkan. Salah satunya isu politik identitas dalam pemilihan wali nagari di kenagarian Sungai Jambu yakni, peneliti melihat ada sebuah dukungan untuk masing-masing calon dari suku, daerah (jorong). Bahkan dalam pelaksanaan pemilihan umum atau pemilihan wali nagari juga termasuk kedalam sebuah proses politik dimana berbagai faktor-faktor identitas bisa menjadi bahan pertarungan untuk mengelola isu kekerabatan, suku, budaya dan daerah, memang tidak akan berjalan dengan baik pada zaman sekarang ini banyak berbagai persoalan yang kita hadapi mulai pertama, sebuah pesta demokrasi seperti pemilihan kepala negara, kepala daerah, atau bahkan pemilihan wali nagari sekalipun bisa ikut untuk mendorong sebuah politik identitas (Buchari, 2014: 20)

Melihat fenomena yang terjadi demikian, ada penguatan dan pengentalan identitas sebagai basis perebutan kekuasaan politik. Politisasi identitas ini terjadi disebabkan identitas menjadikan alat untuk memperoleh kekuasaan bagi elit-elit politik. Politik identitas pada awalnya berangkat dari persamaan senasib, teritorial dan sebagainya, sehingga dijadikan instrumen untuk mendapatkan simpati publik. Dari sini dapat dilihat bahwa politik identitas mengalami transformasi pemaknaan identitas karena proses identitas dibuat untuk kepentingan orang-orang yang membuatnya. Segala elemen-elemen etnisitas dapat menjadi kekuatan untuk memperoleh legitimasi dan menghegemoni masyarakat. Elemen etnis bukan lagi sesuatu yang tidak penting dan tertinggal tetapi justru menjadi kekuatan yang ampuh dalam pemilihan khususnya kontestasi di tingkat lokal.

Pelaksanaan pemilihan wali nagari di kenagarian Sungai Jambu yang diwakili oleh empat orang calon kandidat dari masing-masing jorong dan suku yang berbeda, yakni adanya jorong (Batur, Bulan Sariak, Jambak Ulu, dan Sungai Jambu) serta berasal dari suku (payobadar, caniago, piliang dan sungai napar). Namun dalam pelaksanaan pemilihan wali nagari berlangsung peneliti melihat dari masyarakat pemilih mereka lebih mendukung calon kandidat yang dianggap adanya ikatan primordial tertentu seperti sesuku, satu daerah (jorong) dengan mereka, serta calon wali nagari yang mereka anggap orang terpandang di dalam masyarakat.

Dari isu-isu tersebutlah banyak peneliti-peneliti sebelumnya menemukan politik identitas seperti penelitian yang dilakukan oleh Juhana Nasrudin (2018) dengan judul "Politik Identitas dan Representasi Politik" (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). Hasil penelitian mengatakan bahwa orientasi politik identitas dan representasi politik mempengaruhi proses demokrasi pada kasus pilkada DKI 2018-2022. Identitas dan representasi adalah dua hal yang signifikan dalam kehidupan manusia. Makanya proses demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari orientasi politik identitas. Namun peneliti berpendapat ada kesamaan dan perbedaan, yakni penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, serta teori politik identitas yang digunakan dalam pemilihan. Dan dari sudut pandang perbedaannya ialah waktu dan tempat penelitian, serta pembahasan adanya identitas PILKADA DKI dalam suatu lembaga pemerintahan daerah pusat sedangkan penelitian penulis sendiri mengenai kontestasi pilwanag tingkat nagari (Sripsi Nasrudin, "politik identitas dalam pemilihan kepala daerah studi kasus pada pemilihan gubernur DKI") diakses 25 januari 2021/13:00 WIB)

METODE PENELITIAN

Dalam proses penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini dipandang mampu menganalisa realitas sosial secara mendetail. Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji, membuka, menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya. Sebagaimana Penelitian kualitatif itu adalah sebuah alat untuk memaparkan dan memahami makna yang berasal dari individu dan kelompok mengenai masalah sosial atau masalah individu itu sendiri (Creweel 2012). Sedangkan menurut Bagong Suyanto, Penelitian Kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata tertulis maupun lisan bahkan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang akan diteliti (Sutina, 2005: 166).

Adapun teknik yang peneliti pakai dalam penelitian ini ialah analisis data yang terdiri dari tiga kegiatan secara bersamaan yaitu penyajian data, reduksi data,

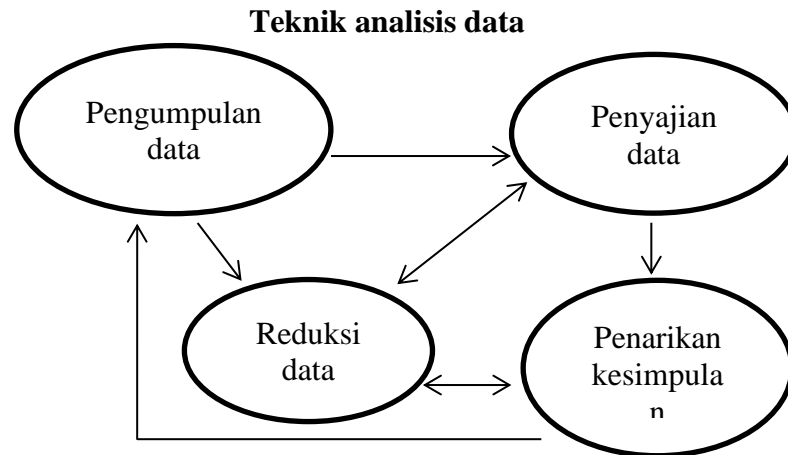
verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Reduksi data adalah proses mengubah data dasar yang hadir dari catatan lapangan, lalu disesuaikan dengan yang dibutuhkan, reduksi ini dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan, dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, menulis memo dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak sesuai dengan penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk menajamkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga pada akhirnya data yang terkumpul dapat diverifikasi.

Display data sangat diperlukan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, ketika data semakin banyak bertumpuk. Display data disajikan dalam bentuk matriks, network, chart, grafik sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menguasai data tersebut. Pendeskripsian sekumpulan informasi data yang tersusun baik, memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam hal ini pengujian data kualitatif juga disajikan secara naratif. Dalam hal ini, informasi disusun dalam bentuk yang memudahkan untuk difahami dalam Politik Identitas dalam Panggung Pilwana pada Pemilihan Wali Nagari Sungai Jambu.

Pengambilan keputusan atau *verifikasi* yang merupakan kegiatan pada akhir penelitian kualitatif. Dari awal peneliti mencari makna dari data yang diperoleh, kemudian dari data tersebut disimpulkan. Makna yang dirumuskan oleh peneliti berasal dari data yang telah diuji kebenarannya. Dalam mencari makna, mendapatkan dari hasil wawancara Politik Identitas dalam Panggung Pilwana pada Pemilihan Wali Nagari Sungai Jambu akan dihimpun dan di narasikan serta dilakukan analisis penarikan kesimpulan berdasarkan teori penarikan analisis data yang peneliti pedomani. Model Interaktif analisis data menurut Miles dan Huberman (1994) dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.1



Sumber: (Miles dan Huberman, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Politik Identitas Dalam Kontestasi Pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Sungai Jambu

Politik identitas pada pemilihan wali nagari Sungai Jambu dapat memunculkan isu yang berkembang dengan latar belakang yang sama sebagai alasan sebuah penghargaan dan solidaritas terhadap suku, dan jorong masing-masing agar tidak hilang secara turun temurun didalam nagari ini. Target inilah yang tidak ketinggalan oleh elit politik memberanikan diri maju sebagai kandidat wali nagari atas dasar pola keterikatan satu sama lain. Sebagaimana dalam teori milik Daniel N. Posner (2007) mengatakan bahwa ada dua kecenderungan elit politik menggunakan isu-isu identitas, setiap kandidat biasanya menggunakan berbagai pola pendekatan terhadap etnisitas menjelang arena pemilihan. Tentu target yang dicapai sebagai sasaran utama adalah etnis yang bersangkutan maupun berdekatan.

Untuk memperoleh informasi yang mendalam terkait bentuk politik identitas pilwara diatas, peneliti mewawancarai kandidat sebagai berikut :

“Pendekatan yang saya lakukan agar masyarakat mengenali sebagai calon wali nagari ialah mengambil kesempatan hadir diacara majelis ta’lim, gotong royong, ta’ziah kematian, serta berkumpul dalam kegiatan pemuda. Namun tidak ketinggalan juga bagi saya meminta doa dan dukungan dari sanak saudara terdekat baik dikampung ataupun perantau”(Wawancara dengan bapak WN, tanggal 17 Mei 2022)

Hasil responden diatas, hampir sama dengan pernyataan kandidat DB sebagai berikut :

“selain hadir diberbagai kegiatan keagamaan, saya juga membantu masyarakat kurang mampu jika ada yang sakit, saya menolong mereka menguruskan BPJS agar tidak banyak mengeluarkan biaya pengobatan, serta pengurusan bantuan dana pendidikan untuk adek-adek yang ingin lanjut kuliah karna faktor orang tua kurang mampu” (Wawancara dengan bapak DB, tanggal 18 Mei 2022)

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menganalisis bahwa politisasi identitas didasarkan pada pendekatan-pendekatan aktifitas sosial demi memperoleh simpati masyarakat agar terpilih sebagai kandidat yang unggul secara keaktifannya, hal ini kerap dilakukan dan sulit ditinggalkan demi tujuan yang ingin dicapai oleh para kandidat yang ingin menduduki kursi kekuasaan.

Adapun sebuah konstruksi yang dibangun atas dasar identitas kesamaan Jorong, suku yang dimiliki oleh kandidat yang dapat dijadikan salah satu alasan mencapai kemenangan sebagai wali nagari. Hal ini juga dilihat dari primordial yang dirasakan oleh masyarakat yang memiliki kesadaran sendiri atas kesamaan tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aspinall (2011) bahwa identitas dalam pertarungan politik pemilihan kandidat dapat menggunakan mobilisasi simbol etnis kesukuan yang menjadi pertimbangan pemilih, serta strategi kandidat memimpin sebagai (putra daerah). Untuk melihat hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan informan tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“kalau saya ditanya mendukung calon yang mana, sudah pasti calon yang disegani masyarakat dalam pergaulannya. dan kebetulan yang mencalonkan anak kamanakan kami yang berasal dari jorong sungai jambu. Kami sebagai niniak mamak dinagari juga menilai kandidat ini aktif dalam berbagai kegiatan di nagari ini. Maka dari itu kami membulatkan suara untuk dia (wawancara, dengan D.MN, tanggal 17 Mei 2022)

Dari hasil wawancara diatas hampir senada dengan responden tokoh masyarakat perempuan yang mengatakan bahwa :

“ibu mendukung calon dari jorong ini karena kedisiplinannya beribadah ke mesjid, pergi ke majelis agama, serta mendukung mendirikan rumah tahfiz yang selama ini belum ada didirikan. ibuk sebagai tokoh masyarakat juga

memberi gambaran kepada masyarakat kalau ingin memilih besok dipilwana bagusnya pilihlah orang yang kita kenal dinagari kita ini. dan ibuk juga mendengar ternyata dari jorong ini banyak yang mendukung beliau. Apalagi kita banyak juga jumlah penduduknya dari pada jorong yang lain (wawancara dengan FM, tanggal 31 Mei 2022)

Berkaitan dari responden diatas peneliti menganalisis bahwa, ternyata identitas dapat berjalan mulus karena didukung dan dikuatkan oleh basis kelompok yang dipandang oleh masyarakat sebagai (niniak mamak), orang yang dianggap penting mampu mempengaruhi pemilih saat pilwana dilaksanakan. Tidak dapat dipungkiri bahwa, politik identitas dijorong ini sering dijadikan alat politik untuk menjaring massa dari bentuk ikatan-ikatan daerah dari keturunan etnis kesukuan yang sama serta penekanan kepada jumlah penduduk yang lebih dominan sebagai strategi kebebasan.

Sentimen identitas kesamaan ini semakin menguat saat berlansungnya pemilihan wali nagari untuk kesekian kalinya yang didominasi dengan isu-isu terkait identitas dalam bentuk kerja sama yang dibangun atas dasar jasa-jasa dari elit politik terhadap sikap sosialisme dalam berkelompok dimasyarakat nagari sebelumnya. Dalam hal ini didasarkan kepada perasaan senasip dalam memanipulasi karakteristik yang tumbuh didalam kehidupan sosial budaya (Bukhari, 2015:19)

Terkait hal tersebut peneliti mewawancarai tim sukses yang mengatakan bahwa :

“saya melakukan ini karena sama-sama anak nagari satu perjuangan dalam kegiatan yang ada dimasyarakat ini, jadi tidak salah kami menolong antar sesama. Jadi disini saya mencoba berbincang-bincang bersama masyarakat sambil duduk diwarung lalu ada yang bertanya siapa yang akan kita pilih bapak wali nagari kita nanti, maka disinilah saya lansung menjawab.. kalau bapak ingin memilih baguslah orang satu jorong dengan kita.. bapak juga bisa lihat bagaimana calon ini dalam bermasyarakat sangat baik dan terpuji (wawancara dengan WN, tanggal 24 Mei 2022)

Dari tanggapan responden tersebut, semakin jelas bahwa kecendrungan dalam peluang mendapatkan dukungan serta memperoleh kekuasaan dapat dilakukan berbagai cara oleh para elit-elit politik. walaupun dari strategi yang

dilakukan terlihat santai namun sangat terkombinasi dimata para penguasa dalam menjaring massa. Hal tersebut juga mengacu pada kubu-kubu pendukung yang saling membentuk poros untuk melawan satu sama lain melalui identitas yang melekat pada karakter personal kandidat yang kemudian diteruskan pada komponen-komponen pendekatan lainnya kepada masyarakat. Apalagi di nagari Sungai Jambu masyarakat cenderung untuk memilih kepada para elit-elit yang memiliki program yang dapat menguntungkan untuk membangun nagari.

Terkait hal ini peneliti mewawancarai tokoh pemuda yang mengatakan bahwa :

“kandidat ini sebelum mencalonkan sebagai wali nagari beliau sebelumnya sudah hadir dalam masyarakat, baik dalam program pemuda nagari, pencak silat, dan program air bersih”(wawancara dengan NF, tanggal 30 Mei 2021)

Dalam kutipan responden ini peneliti menganalisis bahwa, selain mendapatkan seorang pemimpin yang baik yang diinginkan oleh masyarakat nagari ini, tetapi juga terkait pembuktian yang ada ditengah-tengah masyarakat. khususnya pada politik identity dinagari Sungai Jambu yang semakin meningkat dalam daya tarik perpolitikan. Maka tak jarang alasan yang muncul jika ditanya masalah memilih calon yang memiliki latar belakang etnis yang sama, banyak masyarakat akan mengatakan bahwa ketertarikan itu ada karena faktor alamiah yang sulit dirubah-ubah atas dasar kekompakan.

Dari pernyataan tersebut peneliti mewawancarai tim sukses yang mengatakan bahwa :

“saya meminta tolong kepada kelompok tani yang ada di dorong ini untuk dapat mendukung calon kandidat tersebut”(wawancara dengan tim sukses NK, tanggal 24 Mei 2022)

Dari pernyataan tersebut hampir senada dengan responden berikut ini yang mengatakan bahwa :

“sambil ngobrol santai dengan keluarga terkait memilih wali nagari besok saya kasih arahan....kalau dapat mendukung seorang kandidat yang dari daerah kita merupakan hal yang bagus, apalagi selama ini masyarakat kita menginginkan hal tersebut serta mengenali sosok masing-masing yang mencalonkan”

Dari pernyataan responden diatas peneliti menganalisis bahwa, antara beberapa tindakan dari dorongan suatu kelompok dapat mengubah argumen pemilih berdasarkan pendapat orang lain. namun dalam pandangan lainnya bisa saja politik identitas merupakan hal yang wajar dilakukan. Mengingat bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa. Kemudian ditambah lagi dengan berbagai macam dinamika politik yang ada di dalamnya tidak sedikit menimbulkan banyak pro-kontra hingga menjadikan politik identitas sebagai hal yang wajar. Tentunya kita mengenal adanya solidaritas antar sesama kaum. Banyak dari kita yang memiliki ikatan emosional yang kuat dengan seseorang yang memiliki latar belakang yang sama dengan yang dimiliki. Hal ini juga menjadi alasan kuat akan hal tersebut.

Namun dari sisi bentuk politik identitas yang dari cara pandang seseorang akan pilihan politik yang menurut mereka sesuai dengan identitas yang mereka yakini. Dalam hal ini identitas yang di yakini adalah semacam preferensi politik yang dimiliki. Meskipun orang tersebut berasal dari suatu etnis tertentu, namun apabila preferensi politisnya cenderung mengarah ke arah yang nasionalis dan pembangunan sebuah nagari, mereka akan cenderung memilih calon yang memiliki program kerja yang baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki latar belakang yang sama dengan orang tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa : *pertama*, dalam kontestasi pilwara di kenagarian Sungai Jambu politik identitas itu terlihat dari sisi kesukuan dan Jorong.

Kedua, meskipun secara tersirat tidak menggunakan politik identitas namun pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh kandidat dan tim lebih cenderung menggunakan simbol-simbol identitas dalam pilwara tersebut, salah satunya terlihat dari keaktifannya dalam kegiatan bermasyarakat seperti, hadir di majelis ta'lim, ta'ziah, acara pemuda serta mendukung program rumah tahfiz yang ada di nagari Sungai Jambu.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah untuk bisa menjadi masukan terhadap pemerintah serta masyarakat agar dapat lebih memperhatikan lagi bahaya penggunaan politik identitas dalam kontestasi pilwada atau pemilihan umum lainnya, yang bisa menyebabkan terjadinya konflik laten ditengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, Edward. 2011. “*Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine These*” dalam *Journal of East Asian Studies* vol 11

Astuti Buchari, Sri. *Kebangkitan Etnis menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014

Abdillah S., Ubed. 2002. *Politik Identitas : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang : Yayasan Indonesiatara

Agnes Heller seperti yang dikutip Ubed Abdillah, *Politik Identitas Etnis* (Magelang: IndonesiaTera, 2002), h. 22.

Aspinall, Edward. 2011. “*Democratization and Ethnic Politics in Indonesia: Nine*

John W. Creswell. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (PT Pustaka Pelajar.Yogyakarta.2012.)

Siswanto, Suyanto sutina, *Metode Penelitian Kombinasi, Kualitatif & Kuantitatif Pada Penelitian Tindakan (PTK & PTS)*, (Boss Script, Klaten Selatan, 2017)

wijaya, *Politik Identitas Etnis :Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*, (Magelang: Transmedia Pustaka, 2002)

wawanca, jumat 30 desember 2020/10;11WIB

<https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/read/.Kajian.Lipi.PolitikIdentitasDanRepresentasi/>;di akses pada 16 januari 2022

Sripsi Nasrudin, “*politik identitas dalam pemilihan kepala daerah studi kasus pada pemilihan gubernur DKI*”) diakses 25 januari 2021/13:00 WIB